

POLICY BRIEF



KANDIDAT CALON PRESIDEN DAN CHINA: PETA INTERAKSI 3 CALON PRESIDEN 2024 DENGAN CHINA

Penanggung Jawab

Bhima Yudhistira Adhinegara

Penulis

Muhammad Zulfikar Rakhmat
Yeta Purnama

Editor

Dikanaya Tarahita

Ringkasan Eksekutif

Tibalah Indonesia pada momentum krusial dalam pergantian kepemimpinan menyongsong Pemilu 2024. Pesta demokrasi akbar ini semakin dinamis seiring dengan ramainya manuver partai beradu strategi sembari menguji respon masyarakat atas figur-figur yang akan dilontarkan ke arena pertempuran politik.

Proses konsolidasi itu kemudian mengerucutkan kandidasi kepada 3 tokoh yang kiprahnya sudah sering malang-melintang di panggung politik nasional, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

Berbicara mengenai konteks yang lebih luas, siapapun yang akan menjadi Presiden Indonesia nantinya akan memegang tanggung jawab membawa Indonesia tidak hanya menghadapi turbulensi ekonomi, namun juga mengharumkan Tanah Air dalam kontestasi di ranah global. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan masuk jajaran anggota G20, Indonesia memiliki beragam daya tarik di mata investor asing.

Bahkan, intensifnya keterlibatan asing dalam pembangunan domestik Indonesia dalam beberapa tahun belakangan telah membawa China unggul menempati posisi puncak mitra dagang dan investasi di Indonesia. Manajemen isu dan konflik atas ragam kepentingan yang mewarnai dimensi politik dalam dan luar negeri harus dikuasai oleh presiden terpilih agar dapat mendayung di antara kepentingan global yang mulai berbentuk multipolar.

Oleh karena itu, secara spesifik *policy brief* ini bertujuan untuk memetakan interaksi tiga kandidat di atas dengan pihak asing, terutama China, dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia di tahun 2024. Kami melihat sajian diskusi mengenai isu ini akan sangat menarik untuk dinikmati masyarakat guna memperkaya panorama politik kebangsaan Tanah Air.

Secara struktur, bagian pertama *brief* ini akan menjelaskan posisi penting China dalam khasanah perpolitikan Indonesia. Selanjutnya, bagian 2, 3, dan 4 akan memaparkan uraian yang komprehensif mengenai interaksi Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto dengan China selama ini serta memetakan arah panah kebijakan luar negeri ketiga kandidat terhadap China. Pada bagian penutup, *brief* ini akan menawarkan rekomendasi kebijakan bagi presiden terpilih dalam berinteraksi dengan China, sebagai *global power*.

Beberapa bagian dari *brief* ini telah diterbitkan di Australian Outlook dan Stratsea.

China dalam Politik Indonesia



Pada panggung sinema politik Indonesia, China selalu menjadi aktor penting yang memiliki peranan vital dalam proses kematangan bernegara dan berdemokrasi. Melintas lini masa sejarah, hubungan diplomatik China-Indonesia sudah terjalin lebih dari tujuh dekade lalu, tepatnya sejak tahun 1950. Saat itu Indonesia baru berumur setengah dasawarsa dan baru saja terbebas dari cengkraman kolonial pada tahun 1945.

Pada saat yang sama, di tahun 1949 China baru saja menyingkirkan kubu nasionalis dan memperkuat Partai Komunis China (PKC) yang dipimpin oleh Mao Zedong. Porak-poranda akibat konflik, China tengah berjuang menata kestabilan ekonomi, seperti halnya dengan Indonesia pada periode tersebut. Kesamaan inilah yang mendorong China terlibat dalam Gerakan Non-Blok bersama 77 negara lainnya untuk menyusun rangkaian koordinasi dan posisi guna membentuk Tata Kelola Ekonomi Dunia Baru (NIEO). Kesepahaman atas agenda prioritas tersebut kemudian menyemaikan bibit-bibit kedekatan hubungan Presiden Soekarno dan China.

Kendati demikian, keharmonisan keduanya menimbulkan gejolak domestik dalam dinamika politik Indonesia di masa orde lama. Pasca insiden getir G30SPKI di antara tahun 1965-1966 yang mencerminkan kelamnya perpolitikan Nusantara, lahirlah sentimen anti-China yang mengakar di masyarakat. Peristiwa G30SPKI juga mengubah haluan ideologi dan mewariskan paham anti komunisme di Tanah Air.

Sentimen ini berlanjut di era reformasi pada tahun 1998 yang menyebabkan banyak etnis Tionghoa Indonesia menjadi korban kekerasan dan diskriminasi dari warga pribumi. Peristiwa tersebut menorehkan luka yang berdampak hingga hari ini, dan masih menyisakan pandangan antipati masyarakat Indonesia terhadap orang Tionghoa dan China.

Menanggapi situasi yang genting tersebut, pada Desember 1959 China mengirimkan surat protes ke Indonesia terkait pengusiran 165 etnis Tionghoa di Jawa Barat dan insiden lain yang disebabkan oleh kebijakan anti China yang diberlakukan oleh Presiden Soeharto saat itu. Imbas diplomatiknya, China kemudian secara resmi menutup kantor kedutaannya di Jakarta. Konsekuensi dari isu domestik tersebut, ditambah dengan implikasi dari Perang Dingin yang terjadi di dunia global menyebabkan hubungan bilateral antara China dan Indonesia ditanggihkan selama 23 tahun.

¹ Rizal Sukma, "Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship" Routledge. (1999)

² Rizal Sukma, "Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement" Asian Survey. Vol. 49, No. 4. (2009). 591-608.

Selama masa penanguhan, Indonesia dan China mempertahankan hubungan perdagangan tidak secara langsung, melainkan melalui pihak ketiga. Kendati demikian, emergensi kepentingan ekonomi dalam negeri serta perubahan lingkungan ekonomi internasional yang kian mendesak kemudian mendorong Indonesia untuk mengakhiri masa penanguhan dan membuka berinisiatif membuka kembali hubungan perdagangan langsung dengan China pada November 1984. Dalam tempo kurang dari setahun, tepatnya pada Juli 1985, Jakarta memberikan persetujuan resmi kepada Kamar Dagang Indonesia untuk membuka perdagangan langsung yang ditandai dengan penandatanganan nota dagang bersama delegasi pemerintah China di Singapura. Otorisasi ini diikuti dengan kemitraan delegasi bisnis kedua negara sebagai kelanjutan keputusan bersejarah tersebut.

Pada perkembangannya kemudian, posisi strategis China dalam lansekap ekonomi global yang terus menguat mendorong Soeharto menormalisasi kemitraan secara menyeluruh dengan Beijing pada Juli 1990. Status yang membaik ini kemudian diikuti dengan penandatanganan kerja sama pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerja Sama Teknik³.

Walaupun relatif singkat, di era Habibie kerangka pondasi dasar yang menguatkan jalinan China dan Indonesia terus dikonstruksikan. Hal ini yang kemudian mbingkai kebijakan Habibie melalui Inpres No. 4 tahun 1999 untuk menghapus diskriminasi terhadap warga Tionghoa.

Rantai relasi Indonesia-China semakin kokoh menjangkar semasa kepresidenan Abdurrahman Wahid yang melahirkan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai bantuan hibah kerja sama ekonomi dan teknik⁴. Begitu pun di era Megawati Soekarnoputri, MoU mengenai kerja sama infrastruktur seperti pembangunan jembatan dan jalan raya juga ditandatangani⁵.

Aliansi kedua negara di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada pada titik yang stabil, kendatipun relatif stagnan. Hal ini dikarenakan strategi politik SBY mampu menyeimbangkan pengaruh kekuatan dua negara adidaya dunia, China dan AS. Walaupun demikian, korespondensi China dan Indonesia dalam periode ini masih menelurkan kemitraan yang apik karena adanya kerja sama multisektor.

Kulminasi momentum dengan China berlabuh di periode pertama kepemimpinan Jokowi, bersamaan dengan peluncuran *Belt and Road Initiative* (BRI) oleh Xi Jinping yang kian melekatkan kedua negara⁶. Secara geopolitik, Indonesia memiliki keunggulan geografis yang strategis serta pangsa pasar yang besar untuk menyerap dan merealisasikan kepentingan China dalam rangka mengimplementasi *Belt and Road Initiative*. Bak gayung bersambut, agenda prioritas Jokowi yang berfokus pada pembangunan negara, khususnya di bidang infrastruktur juga selaras dengan manifestasi *Belt and Road Initiative*.

Sintesis yang makin kohesif antar kedua negara terjalin hingga akhir periode kedua Jokowi. Bahkan, pengaruh China kian tak dapat dihindari karena Indonesia kini sangat bergantung dari segi ekonomi. Selain menjadi mitra dagang nomor 1, keterbukaan pasar Indonesia untuk pebisnis China telah mengantarkan China menjadi investor terbesar nomor 3 pada triwulan 2 tahun 2023. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dirilis pada akhir Juli 2023 realisasi investasi tersebut menembus angka US\$1,2 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 2.362⁷.

Melalui skema *Belt and Road Initiative*, China juga memiliki proyek-proyek raksasa, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), kawasan industri besar PT IMIP, PT IWIP, serta proyek pembangunan PLTS hingga smelter nikel di beberapa titik di Indonesia. Indonesia dan China juga telah menandatangani kesepakatan *Local Currency Settlement* dimana kedua negara setuju untuk menggunakan mata uang Yuan dan Rupiah dalam transaksi investasi dan perdagangan⁸.

³ Muhammad Zulfikar Rakhmat, "Neo-Gramscianisme dan Geliat Tionghok di Indonesia". Institut Pertanian Bogor Press. (2021).

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ James McBride, et al. "China's Massive Belt and Road Initiative". Council on Foreign Relations, 2 Februari 2023. <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative>.

⁷ Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) triwulan 2 yang dirilis akhir Juli 2023. https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik.

⁸ Muhammad Zulfikar Rakhmat. "Indonesia and China inked a deal to promote the use of the Yuan and Rupiah. The political and economic implications are huge". The Conversation, 14 Oktober 2020. <https://theconversation.com/indonesia-and-china-inked-a-deal-to-promote-the-use-of-the-yuan-and-rupiah-the-political-and-economic-implications-are-huge-147493>.

Ketergantungan Indonesia terhadap China juga merambat ke sektor kesehatan, terutama saat pandemi COVID-19. China merupakan supplier vaksin terbesar ke Indonesia. Diketahui perusahaan *Sinovac* dan *Sinopharm* telah mengekspor sebanyak 16 gelombang yang diperkirakan berjumlah 6,4 juta vaksin jadi dan 115,5 juta vaksin setengah jadi, serta sebanyak 280 juta dosis telah diperjualkan pada Indonesia⁹. Kedekatan keduanya semakin terlihat ketika pemerintah tetap memilih China, meskipun vaksin *Sinovac* saat itu masih ditolak dan diragukan oleh beberapa negara. Padahal, masih banyak negara yang juga berlomba menawarkan vaksin yang sudah teruji seperti jenis *Moderna* dan *Jhonson & Jhonson*.

Dalam kacamata politik kebangsaan, terlepas dari sumbangsih China di panggung ekonomi dan kesehatan, China memiliki posisi penting dalam diskursus politik Tanah Air karena secara bersamaan sentimen terhadap China terus meningkat. Salah satunya disponsori oleh isu Laut China Selatan yang menyerang kedaulatan Bangsa Indonesia¹⁰.

Belum lagi kontroversi yang merebak di masyarakat mengenai isu potensi jebakan utang serta kerusakan lingkungan oleh perusahaan China yang beroperasi di Indonesia¹¹. Kasus-kasus serupa kerap terjadi terutama di sektor industri ekstraktif mineral. Polemik sosial juga tumbuh subur seiring dengan datangnya gelombang tenaga kerja China yang dibiarkan masuk ke Indonesia oleh pemerintah di kala pandemi.

Keterlibatan China telah merasuki lintas sektor, bahkan wajah dinamika politik domestik sering disinggung makin condong pro-China¹². Friksi silang pendapat di antara narasi mengenai kedekatan Indonesia dan China tentu akan turut menyelimuti arah komunikasi politik Tanah Air di sepanjang Pemilu 2024 mendatang. Sungguh menarik kiranya untuk melihat kompas politik ketiga kandidat Presiden, apakah akan melempar sauh atau berlabuh menjauh dari China?



sumber foto: jatengprov.go.id

⁹ Aria Cindrya, "China tegaskan komitmen perkuat kerjasama vaksin dengan Indonesia". Antara News, 15 Juli 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2268914/china-tegaskan-komitmen-perkuat-kerja-sama-vaksin-dengan-indonesia>.

¹⁰ Yizheng Zou, "China and Indonesia's responses to maritime disputes in the South China Sea: forming a tacit understanding on security". *Marine Policy*, Vol. 149. (2023).

¹¹ Lebih lanjut dapat membaca laporan CELIOS tahun 2023 berjudul "Polemik Investasi China Di Indonesia: Bagaimana Menghindari Kualitas Investasi yang Rendah dan Jebakan Utang?". <https://celios.co.id/2023/policy-paper-polemik-china-menghindari-investasi-berkualitas-rendah-dan-jebakan-utang/>.

¹² Pajar Hatma Indra Jaya, "Distorsi Komunikasi Pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi di Media Sosial" *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 14, No. 2. (2017): 259-276.



Anies Baswedan

Aksi-reaksi ragam kekuatan politik di Indonesia telah mengkonsolidasi tiga partai besar untuk secara resmi mencalonkan Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, sebagai calon presiden. Kontestasi pemilihan umum akan digelar pada Februari 2024. Deklarasi Anies sebagai calon presiden pada Maret 2023 didukung NasDem (Nasional Demokrat), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat, yang bersama-sama disebut Koalisi Perubahan. Satu hal yang paling disorot sejak pencalonan Anies adalah arah kiblat politik mana yang akan ia ikuti jika memenangkan Pemilu. Hal ini sering dikaitkan dengan dua kekuatan besar yang berpengaruh di Indonesia, yakni China dan Amerika Serikat.

Dibandingkan dengan calon presiden lain seperti Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat ini yang aktivitas politik dalam negerinya kerap digandrungi media nasional, Anies lebih dikenal dengan perannya yang lebih aktif membangun relasi kerja sama dengan negara dan mitra Barat. Walaupun pemerintah pusat tampak lebih condong kepada China, karir politik Anies hingga saat ini kerap dikaitkan dengan perannya dalam pembangunan kemitraan bersama dunia Barat. Ilustrasinya adalah intensifnya kunjungan Anies di tahun 2022 ke empat negara Eropa, antara lain Inggris, Jerman, Prancis, dan Luksemburg¹³.

Dalam kunjungan bersama ke Inggris, delegasi membahas kerjasama elektrifikasi armada bus Transjakarta dengan *Bloomberg New Energy Finance*¹⁴. Program ini diupayakan untuk mendorong target Jakarta bebas emisi pada 2050. Selain itu, Anies juga menawarkan kerja sama pengembangan *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta, sistem kereta bawah tanah baru yang menghubungkan pinggiran kota dan kota kepada delapan perusahaan Inggris (*Crossrail International, Grup XRail, Arup, Colas Rail, BDP, Alstom, dan Mott MacDonald*).

Kunjungan lainnya ke Eropa juga membuahkan hasil yang sama. Di Jerman, Anies bertemu dengan walikota Berlin untuk membahas *Jakarta Future City Hub* dan prospek untuk membuka kolaborasi pengembangan kota pintar (*smart city*). Konsep *smart city* bertujuan untuk mengembangkan Jakarta dengan teknologi digital guna mengoptimalkan fungsi kota, serta menekan biaya dan konsumsi guna memperoleh manfaat yang efektif dan berkelanjutan bagi warganya.

Dalam pertemuan dengan mitra Perancis, Anies berhasil mendapatkan kemitraan untuk pembangunan MRT Jakarta tahap 3 dan 4, dengan dua perusahaan Perancis Alstom dan Thales. Kolaborasi ini mencakup proyek lebih lanjut dengan *Alstom* pada solusi sistem rel yang mencakup sarana kereta api, sinyal, infrastruktur, serta skema pengadaan MRT Jakarta; dan *Thales*, mengenai solusi teknologi untuk integrasi sistem tiket. Perhentian terakhir dalam perjalanan Eropa tersebut adalah Luksemburg untuk membahas kerjasama infrastruktur dengan *European Investment Bank*.

¹³ Ihsanuddin, "Anies 8 Hari Dinas ke Eropa, Apa Saja Hasilnya?". Kompas.com, 23 Mei 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/23/13532501/anies-8-hari-dinas-ke-eropa-apa-saja-hasilnya?page=all>

¹⁴ Singgih Wiryono, "Bertemu CEO Bloomberg NEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta". Kompas.com, 16 Mei 2023. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/16/06480521/bertemu-ceo-bloombergnef-di-london-anies-jajaki-kerja-sama-percepatan>.

Pada acara lain, Anies juga aktif merapatkan diri ke rekan-rekan Amerika dan pejabat pemerintahan Joe Biden. Di sela-sela penyelenggaraan G20 di Bali pada pertengahan November 2022, Anies diundang ke *Forum CEO Bloomberg* untuk berbagi pengalamannya selama menjabat sebagai Gubernur di Ibu Kota. Ia juga terlihat berdiskusi tentang politik Indonesia dengan Sung Yong Kim, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, saat makan siang bersama di Nusa Dua, Bali. Di antara banyak kontakannya di Australia, Anies juga pernah bertemu dengan Malcolm Turnbull, mantan perdana menteri Australia. Keduanya membahas energi dan perubahan iklim global.

Atmosfer ini terasa kontras sekali jika dibandingkan dengan pertemuan Anies dengan tokoh penting asal China. Bahkan terakhir kali Anies terlihat pernah bertemu dengan duta besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, terjadi pada tahun 2019. Demi meningkatkan kemitraan Jakarta, pertemuan tersebut membahas pandangan keduanya tentang potensi kerja sama kota kembar (*sister city*), termasuk merajut kolaborasi dalam sektor pariwisata, perencanaan kota, budaya, industri, serta koperasi perdagangan.

Melihat rekam jejak Anies dalam beberapa tahun terakhir yang jarang bersinggungan dengan China, setidaknya ada tiga alasan mengapa China tidak mungkin memenuhi peran sentral dalam agenda politik Anies Baswedan jika dia memenangkan pemilihan presiden tahun depan.

a.

Pertama, jika dilihat dari segi kunjungan dan kedekatan, Anies terlihat lebih dekat menjalin relasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah latar belakang pendidikan Anies. Ia bertahun-tahun tinggal di Negeri Paman Sam selama menamatkan gelar masternya dari *University of Maryland* dan kemudian *Northern Illinois University* untuk gelar doktornya – melalui beasiswa Program *Fulbright AS*.

b.

Alasan kedua agaknya lebih politis. Pasalnya, politisi Indonesia yang memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin Partai Komunis China (PKC) umumnya mengalami kekalahan di tempat pemungutan suara. Masifnya investasi China dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang kerap kali diwarnai kontroversi menyuburkan sentimen anti China di Tanah Air. Bisa jadi, tak terlabeli ‘antek China’ dapat menjadi jurus jitu untuk mengambil simpati masyarakat.

c.

Faktor ketiga, Anies tampaknya tidak ingin disamakan dengan kepemimpinan era Jokowi yang dinilai lebih condong ke China. Ia ingin mengubah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap pemerintah yang selama ini dikritik masyarakat karena terlalu pro-China.

Jika Anies memenangkan Pemilu 2024, wajah politik luar negeri pemerintah saat ini yang kerap disandingkan dengan narasi pro-China tampaknya akan bertransformasi. Apabila kedekatan Anies dengan Barat terus dikonsolidasi, bisa jadi kebijakan luar negeri Indonesia akan sangat berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

Tak akan mengherankan bila terpilih, salah satu agenda prioritas Anies akan mendiversifikasi negara mitra Indonesia, sembari mencari peluang dan melebarkan koneksinya untuk membangun kerja sama yang lebih erat dengan mitra Barat. Meskipun demikian, Anies tidak akan melakukan manuver gegabah mengambil jarak secara drastis, mengingat status kemitraan dengan China saat ini yang terjalin erat di berbagai sektor, terlebih 3 partai besar yang mengusung kandidasinya juga memiliki kerja sama dengan PKC.

Figur 1. Peta Relasi Anies dan Berbagai Negara di Dunia



Negara

Inggris

Aktivitas

- Kerja sama elektrifikasi armada bus Transjakarta dengan *Bloomberg New Energy Finance* untuk mendorong target Jakarta bebas emisi pada 2050.
- Kerja sama pengembangan *Mass Rapid Transit (MRT)* Jakarta dengan delapan perusahaan Inggris (*Crossrail International, Grup XRail, Arup, Colas Rail, BDP, Alstom, dan Mott MacDonald*).



Negara

Jerman

Aktivitas

- Bertemu dengan walikota Berlin untuk membahas *Jakarta Future City Hub* dan prospek untuk membuka kolaborasi pengembangan kota pintar (*smart city*).



Negara

Perancis

Aktivitas

- Kemitraan untuk pembangunan MRT Jakarta tahap 3 dan 4, dengan dua perusahaan Perancis *Alstom* dan *Thales*.



Negara

Luksemburg

Aktivitas

- Membahas kerjasama infrastruktur dengan *European Investment Bank*.



Negara

Amerika Serikat

Aktivitas

- Di sela-sela penyelenggaraan G20 di Bali pada pertengahan November 2022, Anies diundang ke *Forum CEO Bloomberg* untuk berbagi pengalamannya selama menjabat sebagai Gubernur di Ibu Kota.
- Berdiskusi tentang politik Indonesia dengan Sung Yong Kim, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.



Negara

Australia

Aktivitas

- Pada Maret 2023, bertemu dengan Malcolm Turnbull, mantan perdana menteri Australia guna membahas energi dan perubahan iklim global.



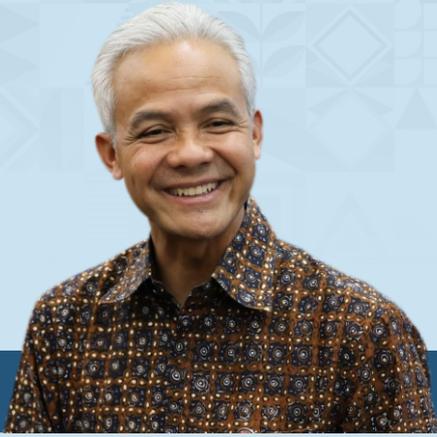
Negara

China

Aktivitas

- Bertemu dengan duta besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, pada tahun 2019 membahas tentang potensi kerja sama kota kembar (*sister city*), kolaborasi dalam sektor pariwisata, perencanaan kota, budaya, industri, serta koperasi perdagangan.

Sumber: Diolah oleh CELIOS dari berbagai sumber.



Ganjar Pranowo

Berbeda dengan Anies, Ganjar yang diusung dari partai *incumbent* saat ini ditengarai akan meneruskan warna politik dalam negeri yang memiliki kecenderungan pro-China jika memenangkan panggung pemilihan calon presiden Indonesia 2024. Sepak terjang kebijakannya juga lebih sering bersinggungan dengan China daripada pesaingnya. Tentu dekat dengan China bagai memegang pisau bermata dua. Apakah situasi demikian akan melabuhkan tongkat estafet kepresidenan kembali pada jagoan Partai Banteng ini, atau malah berpotensi menjadi bumerang?

PDIP melakukan manuver politik dengan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, di Istana Batu Tulis, Bogor pada 21 April 2023.

Sebagai calon presiden dari partai besar dan memiliki peluang elektabilitas tertinggi, banyak orang mempertanyakan kemungkinan keterlibatan Ganjar dengan China sebagai kekuatan eksternal yang berpengaruh di Indonesia. Menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, sejak tahun 2013 hingga 2023, Ganjar diketahui memiliki relasi yang cukup erat dengan Beijing.

Disinyalir kondisi ini akan mengkonversikan hubungan dengan China yang kian harmonis di bawah kepresidenannya, bila terpilih. Arah setir atas kebijakan luar negeri Indonesia diproyeksikan akan tetap terikat dengan pendekatan saat ini, atau mungkin bahkan semakin melaju kencang mendekati diri kepada China.

Dibandingkan dengan sesama kandidat seperti Anies Baswedan, Ganjar tampaknya lebih aktif terlibat dengan China. Pada tahun 2019 misalnya, Xiao Qian, Duta Besar China untuk Indonesia saat itu, didampingi oleh Gu Jingqi, Konsul Jenderal China untuk Surabaya, melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan ini meliputi kota-kota di Kabupaten Solo, Semarang, Pemalang, dan Pekalongan. Dalam kesempatan itu, Xiao dan rombongan bertemu dengan Ganjar dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Yogyakarta. Mereka mengunjungi beberapa tempat seperti Kebun Percobaan Varietas Unggul China (Guangxi)-Indonesia, Masjid Agung Jawa Tengah, dan Chunshen *Comprehensive Fishery Base*, serta bertemu dengan organisasi mahasiswa Tionghoa di Yogyakarta.

Kunjungan tersebut sangat bermakna karena dilakukan setelah Ganjar terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai gubernur. Impresi positif disampaikan oleh Xiao yang juga menyatakan penghargaan atas dukungan Ganjar selaku gubernur dengan organisasi Tionghoa. Menurut Xiao, kemitraan China-Indonesia telah memasuki era baru, terlihat dari perkembangan kerja sama yang cepat dan menyeluruh.

Bahkan Xiao menegaskan, bagi China, Jawa Tengah merupakan kawasan ekonomi penting karena memiliki jumlah penduduknya dan pangsa pasar yang masif. Terletak di tengah Pulau Jawa, kondisi geografis Jawa Tengah memberikan potensi besar bagi pengembangan transportasi darat dan laut di wilayah tersebut, yang juga selaras dengan agenda pembangunan infrastruktur yang digaungkan oleh *Belt and Road Initiative* milik China.

Dalam kunjungan tersebut, China juga menyampaikan minatnya untuk memperkuat kerja sama di level regional dengan Jawa Tengah, khususnya kerja sama di bidang pariwisata, infrastruktur, dan pertanian. Selain mencapai pembangunan bersama, China dan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang kemanusiaan. Afinitas dan minat China tersebut disambut Ganjar secara antusias. Ia menegaskan, bagi Indonesia, khususnya Jawa Tengah, China merupakan mitra strategis. Keduanya sepakat untuk memperkuat pertukaran dan kerja sama antar provinsi dan kota untuk mendukung penguatan lintas bidang, seperti industri, pariwisata, perikanan, dan pertanian.

Komitmen itu disaksikan puluhan investor China di sektor kayu dan mebel yang sepanjang tahun menginvestasikan US\$ 2 miliar ke perekonomian Jawa Tengah. Sebanyak 59 perusahaan China dilaporkan akan melakukan relokasi ke provinsi ini sebagaimana disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada acara *15th Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2019*.

Mediasi sebelumnya pada 2015 dilakukan oleh Ganjar dalam kunjungannya ke China untuk menghimbau para pengusaha China berinvestasi di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan sampah dan limbah industri. Tak hanya itu saja, pada tahun 2018, *China Hebei Bishi Steel Group*, sebuah perusahaan baja Tiongkok, menginvestasikan US\$2,54 miliar di Jawa Tengah. Investasi ini juga membantu mendorong pembangunan lokal dengan perusahaan *Central Jarvan*, PT Seafer Kawasan Industri, untuk mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut.

Baru-baru ini, pada Mei 2023, Ganjar kembali mengadakan pertemuan dengan delegasi dan perwakilan China dari Provinsi Fujian, Zhou Zuyi. Perjumpaan mereka tidak hanya memperingati 20 tahun kerja sama di tingkat provinsi antara China dan Indonesia, tetapi juga penandatanganan perjanjian investasi lebih lanjut, salah satunya adalah pembangunan pabrik energi di Kawasan Industri Batang. Proyek ini diperkirakan akan membuka lapangan pekerjaan dengan jumlah yang masif, sekitar 10 ribu tenaga kerja lokal, termasuk tenaga ahli di bidang yang dibutuhkan¹⁵.

Pada kesempatan yang sama, China dan Jawa Tengah juga mendeklarasikan penandatanganan kerja sama di bidang pendidikan, terutama di sektor edukasi vokasional untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mahir dan kompeten.

Sementara kandidat lain seperti Anies cenderung membuat lebih sedikit pernyataan tentang China, Ganjar justru kerap terlihat memuji negara tersebut dalam beberapa kesempatan, terakhir kali terjadi dalam Pertemuan Budaya Jawa Bali di Sanur pada Juni 2023. Sesuai dengan penuturan Ganjar yang mengutip Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa ada tiga negara besar yang unggul secara budaya dan mampu membangun sistem secara mandiri dari negara-negara Barat, yaitu India, China, dan Rusia.

Lebih lanjut, Ganjar menyatakan bahwa tantangan global saat ini semakin multipolar, dimana Amerika Serikat dan Barat tidak lagi menjadi pusat kekuatan ekonomi. Masa depan pertumbuhan ekonomi, ujar Ganjar, justru dapat ditemukan di negara-negara Asia seperti China dan India. Karena itu, tegasnya, Indonesia perlu mengikuti atau mengadopsi langkah negara-negara tersebut untuk mengejar pembangunan ekonomi Indonesia.

Dalam konteks sosial dan kemanusiaan, Ganjar juga terlihat tak ingin diskriminasi dan sentimen negatif yang sering dialamatkan oleh golongan minoritas terus berlanjut di negeri ini. Hal itu terlihat dari sikapnya yang menerima dengan tangan terbuka undangan makan siang bersama Boen Hian Tong (komunitas sosial Tionghoa-Indonesia) pada tahun 2020 lalu. Dalam kesempatan itu, ia melontarkan pujian bahwasanya orang Tionghoa juga berbagi prinsip komunitas yang sama dengan orang Jawa¹⁶.

¹⁵ Erika Dyah Fitriani, "Tingkatkan Kerja Sama Jateng-China, Ganjar: Tenaga Kerja Minimal 10 Ribu", Detik Jateng, 10 Mei 2023. <https://www.detik.com/jateng/jawa-tengah-meriah/d-6713520/tingkatkan-kerja-sama-jateng-china-ganjar-tenaga-kerja-minimal-10-ribu>.

¹⁶ Leo Suryadinata, "Ganjar Pranowo: Indonesia's potential presidential candidate stuck between a rock and a hard place", ThinkChina, 7 Oktober 2022. <https://www.thinkchina.sg/ganjar-pranowo-indonesias-potential-presidential-candidate-stuck-between-rock-and-hard-place>.

Setahun kemudian, Ganjar juga menjadi keynote speaker dalam webinar bertajuk "Suka Duka Menjadi Tionghoa di Indonesia" yang diselenggarakan oleh ikatan alumni Universitas Gadjah Mada dalam rangka memperingati Tahun Baru Imlek. Beliau menekankan pentingnya menjaga kerukunan bangsa, dimana etnis Tionghoa merupakan komponen yang tidak terpisahkan. Ia sangat senang mengetahui bahwa Indonesia telah menyatakan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional sehingga masyarakat Tionghoa dan non-Tionghoa dapat menikmatinya bersama.

Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kedekatan Ganjar dengan China. Pertama, hal ini juga merupakan refleksi sejarah kedekatan dan kerja sama yang terjalin antara PDIP dengan Partai Komunis China (PKC). Kontak keduanya terbukti meningkat pesat sejak tahun 2011 ketika PKC mengirimkan delegasi untuk mengunjungi kantor PDIP di Jakarta Selatan. Dua tahun berselang, pada tahun 2013, PDIP mengirimkan 15 kader ke Tiongkok untuk membalas kunjungan PKC tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga berkunjung ke China pada 2015 untuk meresmikan Gedung Pusat Kerja Sama Indonesia-China, didampingi langsung oleh pejabat dan petinggi PKC. Tak bisa dipungkiri, kedekatan PDIP dan PKC turut mempengaruhi kuatnya ikatan Ganjar dan China.

Alasan kedua sejatinya masih berkaitan dengan kepentingan partai. Kacamata publik melihat Jokowi dan Ganjar sebagai patron PDIP. Jokowi sendiri memiliki hubungan yang erat dengan China, terlihat dari arah kebijakan luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinannya yang lebih condong ke China, terutama di bidang pembangunan dan infrastruktur.

Andai Ganjar berhasil memenangkan Pemilu tahun depan, besar kemungkinan arah kebijakan luar negerinya tidak akan jauh berbeda dengan Jokowi. Yang pasti, secara terbuka Ganjar telah menyatakan akan melanjutkan banyak program Jokowi. Dalam skenario ini, tentu saja program Jokowi banyak bersinggungan dengan China. Alhasil, kiranya relasi harmonis yang terikat antara Indonesia dan China akan semakin ditingkatkan di era Ganjar.

Figur 2. Peta Relasi Ganjar dan China

2015

Melakukan kunjungan ke China untuk menghimbau para pengusaha China berinvestasi di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan sampah dan limbah industri.

2018

China Hebei Bishi Steel Group berinvestasi ke Jawa Tengah senilai US\$2,54 miliar.



2019

Bertemu dengan Xiao Qian, Duta Besar China untuk Indonesia saat itu, didampingi oleh Gu Jingqi, Konsulat Jenderal China untuk Surabaya, melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Jawa Tengah.

2023

Bertemu dengan delegasi dan perwakilan China dari Provinsi Fujian, Zhou Zuyi untuk memperingati 20 tahun kerja sama di tingkat provinsi antara keduanya.

Menandatangani perjanjian investasi pembangunan pabrik energi di Kawasan Industri Batang.

Sumber:

Diolah oleh CELIOS dari berbagai sumber.



Prabowo Subianto

Prabowo memiliki karir politik yang panjang dan penuh warna setelah selesai menjabat di militer, hingga saat ini berperan sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Di tengah pasang surut perjalanan politiknya, ia beberapa kali bertarung baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden dalam tiga Pemilu terakhir. Ia juga berpeluang menjadi calon kandidat presiden dari Partai Gerindra dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Berbagai kekalahan nampaknya tak menyurutkan niatnya untuk berlaga lagi dan lagi. Bisa jadi atribut ini merupakan manifestasi bukti karakter kuatnya sebagai mantan prajurit TNI yang pantang menyerah.

Prabowo pertama kali mencicipi kontestasi politik Tanah Air pada tahun 2009 sebagai cawapres Megawati Soekarnoputri. Pemilu berikutnya ia mempertaruhkan nasib dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2014 dengan pasangan Hatta Rajasa dari PAN dan lima tahun kemudian dengan Sandiaga Uno. Presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo mengalahkannya dalam dua Pemilu terakhir, kendati kemudian membuat keputusan untuk mengkooptasi Prabowo dan Sandiaga sebagai menteri dalam kabinetnya saat ini. Praktis, Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan tahun depan akan menjadi pengalaman yang keempat bagi Prabowo.

Selayaknya menteri di bawah kabinet Jokowi, Prabowo adalah bagian dari sistem di mana kebijakan luar negeri pemerintah saat ini sangat selaras dengan kepentingan China. Andaikata Prabowo memenangkan Pemilu 2024, apakah visi kepresidenannya akan berjalan seirama atau justru berseberangan gagasan dengan Jokowi dan memilih merenggangkan jarak dengan China?

Mengulur benang sejarah, Prabowo termasuk salah satu pejabat Indonesia yang sering berinteraksi dengan China, terlebih ketika ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pada November 2019, misalnya, Prabowo bertemu dengan Jenderal Wei Fenghe dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Plus ke-6 di Bangkok. Sebulan kemudian, keduanya mengadakan pertemuan tatap muka di Beijing, di mana mereka membahas kemungkinan membina kerja sama di sektor industri pertahanan.

Perjumpaan itu mengamplifikasi pertemuan yang lebih krusial ketika Prabowo menerima kunjungan Menteri Pertahanan China di Jakarta pada September 2022. Eskalasi ketegangan di Laut China Selatan menjadi pokok bahasan dalam dialog di antara keduanya. Prabowo menekankan sikap tegas Indonesia untuk senantiasa menegakkan kebijakan luar negeri yang bebas-aktif dan akan terus mendorong perdamaian di Kawasan. Intensitas pertemuan dengan petinggi China semakin persisten karena pada November 2022, Prabowo kembali terbang ke Xi’an untuk bertemu dengan Jenderal Wei Fenghe. Keduanya membahas kelanjutan kerja sama di berbagai sektor yang tertunda akibat pandemi COVID-19, seperti agenda latihan militer bersama dan kolaborasi mengenai pendidikan militer.

Prabowo terus berupaya meningkatkan kerja sama bilateral melalui pembentukan Forum 2+2 Indonesia-China. Forum tersebut, menurut Prabowo, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama terpadu kedua negara secara signifikan, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan di masa mendatang.

Keterlibatan forum potensial seperti ini bukanlah konsep asing dalam hubungan bilateral. Selama bertahun-tahun, hubungan Indonesia-China diperkuat melalui forum pertemuan bilateral tahunan yang dikenal dengan *Defence Industry Cooperation Meeting (DICM)*. Platform tersebut juga menjadi titik temu bagi Prabowo untuk berjumpa dan berdiskusi dengan rekan-rekannya yang memiliki latar belakang militer dan pertahanan dari China.

Industri pertahanan juga melihat aktivitas yang dinamis selama Prabowo menjabat sebagai menteri, salah satunya ia berupaya untuk memperlancar kerja sama dengan perusahaan China. Baru-baru ini, misalnya, Kementerian Pertahanan membahas kemungkinan kemitraan pertahanan antara BUMN seperti PT. LEN, PT. Dirgantara Indonesia, dan PT. Dahana dengan korporasi dari China¹⁷.

Kendati demikian, nampak jelas minat Prabowo terhadap China melampaui ranah pertahanan, yang tercatat sejak sebelum upayanya mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019. Prabowo pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia harus meniru upaya China dalam pengentasan kemiskinan, yang dianggapnya sebagai kisah sukses dalam waktu yang relatif singkat. Menariknya, hal itu ia sampaikan dalam salah satu debat calon presiden 2019.



sumber foto: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Bagi publik, sudah bukan rahasia lagi bahwa Prabowo memiliki kekaguman terhadap China. Dalam perayaan HUT RI ke-69 di Jakarta tahun 2018 lalu, Prabowo menyebutkan bahwa China merupakan negara penting bagi Indonesia sehingga relasi yang baik perlu dibina di antara keduanya. Pada tahun yang sama, Prabowo juga mengadakan pertemuan dengan Duta Besar China Xiao Qian di Hambalang, Bogor. Pertemuan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Prabowo dan Gerindra yang selalu memberikan sambutan hangat kepada para diplomat China.

Peristiwa itu semakin mempertegas kedekatan hubungan antara Prabowo dan China. Prabowo menanggapi dengan menyatakan bahwa siapapun yang mengorbankan waktu dan tenaganya untuk bepergian dan bertemu dengan rakyat Indonesia sungguh menunjukkan niat ketulusan, dan karenanya harus dianggap sebagai sahabat yang baik bagi Nusantara. Ia juga menyatakan bahwa China adalah negara adidaya dengan pengaruh besar di dunia.

¹⁷ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "Menhan Prabowo Bertemu Menhan China Bicarakan Kerja Sama Komprehensif", 4 Juni, 2023. <https://www.kemhan.go.id/2023/06/04/menhan-prabowo-bertemu-menhan-china-bicarakan-kerja-sama-komprehensif.html>.

Kilasannya pernyataan-pernyataan Prabowo yang disebutkan di atas hanyalah sepenggal kecil dari seberapa tingginya Prabowo memandang China. Walaupun demikian, bisa juga hal ini secara sederhana dimaknai sebagai upayanya untuk menarik simpati pemerintah China dan memanfaatkan peluang investasi asing ke Tanah Air.

Menyaksikan fakta bahwa ekspresi positif Prabowo terhadap China tersebut disampaikan bahkan sebelum mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Presiden 2019 lalu, memberi pertanda pendekatannya ke China sebagai Presiden andai terpilih di Pemilu 2024 kelak kemungkinan besar selaras dengan kebijakan Jokowi di era sekarang yang telah menarik banyak investasi dan proyek China selama beberapa tahun terakhir.

Frekuensi interaksi Prabowo dengan China selama ini memang patut diperhatikan sebagai indikator potensi arah politik luar negeri Indonesia mendatang apabila ia terpilih sebagai presiden. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa kekerabatan yang terjalin tidak terlepas dari fakta bahwa banyak dari keterlibatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari jabatan resminya sebagai menteri di kabinet Jokowi. Dengan demikian, sebagian tampilan kedekatan Prabowo dengan China harus dilihat dari lensa arah kebijakan luar negeri Jokowi yang lebih luas.

Kendati demikian, kemungkinan besar Prabowo akan tetap menjaga hubungan baik dengan China jika ingin merebut posisi puncak pada Pilpres 2024. Selama ini Prabowo gemar menampilkan pandangan dan keahliannya dalam kebijakan luar negeri serta urusan global. Sehingga, sikap yang akan ditampilkan Prabowo setelah dideklarasikan sebagai capres 2024 serta jawaban-jawabannya nanti dalam debat calon presiden mendatang dapat menjadi tolak ukur yang akan memprediksi bagaimana posisi Indonesia di bawah komandonya menghadapi China. Apakah tendensi ini kemudian akan merenggangkan hubungan dengan mitra Barat tradisional Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Australia?

Selain hubungan personal yang terjalin apik, di skala kelembagaan, Gerindra, seperti banyak parpol lainnya juga menjalin kerja sama dengan PKC. Meskipun bila dibandingkan, keterlibatan Gerindra tidak seintim relasi yang terjalin antara PKC dan PDIP, yang juga merupakan kendaraan politik Jokowi. Waktu akan memberi tahu apakah Gerindra akan memainkan peran lebih besar dalam melibatkan China di bawah pemerintahan Prabowo apabila ia berhasil memangku jabatan presiden kelak.

Penting juga untuk dicatat bahwa terlepas dari pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan dalam berinteraksi dengan China, Prabowo kurang berpengalaman dalam membahas isu berkenaan dengan bidang ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintahan Prabowo, jika ia menang, untuk memilih representasi kabinet yang tepat guna menerjemahkan pandangan dan visi Prabowo ke dalam hubungan ekonomi yang sehat dengan China.

Sangat menarik untuk memprediksi bagaimana arah politik luar negeri Indonesia kelak di tangan ketiga calon Presiden, baik itu Prabowo, Ganjar Pranowo, ataupun Anies Baswedan. Mengingat pengaruh China sudah begitu mengakar di Indonesia, agaknya ketiga calon di atas akan terus mempertahankan hubungan baik dengan China. Namun, mungkin ada gaya strategi politik yang berbeda dalam mengarahkan hubungan bilateral Indonesia-China dibandingkan dengan pendekatan diplomasi di era Jokowi.

Figur 3. Peta Relasi Prabowo dan China

2018

Bertemu dengan Duta Besar China Xiao Qian di Hambalang, Bogor.

2019

Bertemu dengan Jenderal Wei Fenghe dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Plus ke-6 di Bangkok.

Kembali bertemu dengan Wei di Beijing untuk membahas kemungkinan kerja sama di sektor industri pertahanan.



2022

Menerima kunjungan Menteri Pertahanan China di Jakarta untuk membahas eskalasi ketegangan di Laut China Selatan.

Berkunjung ke Xi'an untuk bertemu dengan Jenderal Wei Fenghe untuk membahas kelanjutan kerja sama mengenai latihan militer bersama dan kolaborasi mengenai pendidikan militer.

2023

Bertemu dengan Menteri Pertahanan China Li Shangfu di sela-sela dialog Shangri-La di Singapura.

Sumber:

Diolah oleh CELIOS dari berbagai sumber.

10 Rekomendasi untuk Presiden Terpilih

1. Memahami *bargaining power* Indonesia atas China

Presiden terpilih harus memiliki kematangan dan kecakapan dalam memahami *bargaining power* atau daya tawar Indonesia dalam berelasi dengan *foreign power*, seperti China, terutama dalam mengkonstruksi kebijakan implementasi megaprojek *Belt and Road Initiative*.

Indonesia mengantongi status sebagai negara yang mempunyai pangsa pasar terbesar di ASEAN. Penobatan Indonesia sebagai negara anggota G20 juga mengindikasikan keyakinan masyarakat internasional tentang kekuatan ekonomi negeri ini. Terlebih, jika merujuk pada peta *Belt and Road Initiative*, Indonesia memangku posisi krusial dalam manifestasi jalur maritim megaprojek tersebut yang mensolidasi pentingnya Indonesia bagi China.

Pada sisi lain, kepiawaian dalam memahami kelemahan dan kebutuhan China pun menjadi atribut vital yang harus dimiliki oleh seluruh kandidat Presiden RI. Parameter yang dapat digunakan adalah dengan menganalisis kondisi domestik China. Proyek *Belt and Road Initiative* sejatinya diluncurkan sebagai konsekuensi jalan keluar atas kondisi ekonomi China yang tak sehat sejak krisis finansial global tahun 2008.

China memiliki banyak sekali masalah domestik, seperti *overaccumulation* atau kelebihan bahan baku konstruksi dan kelebihan pasokan valas yang perlu dialihkan ke negara mitra. Strategi ini bertujuan untuk menyeimbangkan kestabilan ekonomi domestiknya sekaligus melegitimasi kekuatan Partai Komunis China (PKC) kepada warga negaranya sendiri.

Sehingga dalam konteks ini, tidak hanya negara-negara yang dilewati oleh jalur *Belt and Road Initiative* yang membutuhkan suntikan investasi dari China, tetapi pemerintah China juga sangat membutuhkan keterlibatan mereka.

Kerangka berpikir inilah yang sangat penting dipahami oleh siapapun presiden terpilih nantinya. Jangan sekedar memposisikan Indonesia sebagai pasar yang dengan mudah dapat dimasuki produk asal China. Diperlukan keluwesan dan kepiawaian dalam bernegosiasi atas ketentuan yang tertuang pada MoU dengan China untuk mendapatkan manfaat mutual atas kerja sama kedua negara.

Dalam hal ini, pemerintah juga harus selektif dalam menentukan proyek *Belt and Road Initiative* mana yang akan memberikan keuntungan optimal, dan mana proyek yang berisiko menimbulkan kerugian. Analisis kelayakan suatu proyek sangat perlu dikaji sebagai bahan pertimbangan karena pada dasarnya, dalam sudut pandang bisnis China tentu saja akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jangan sampai dampak buruk yang masif akibat bermitra dengan China terlambat untuk dimitigasi dan meninggalkan warisan utang bagi generasi selanjutnya.

2. Renegosiasi proyek yang berpotensi terjebak hutang

Segudang kesepakatan kerja sama Indonesia-China telah ditandatangani di era Jokowi. Warisan kemitraan ini perlu segera ditinjau kembali terutama pada proyek besar, seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang sangat bermasalah, baik dalam segi kesepakatan, proses pembangunan, pembebasan lahan, isu lingkungan, hingga aspek keselamatan pekerja.

Kendati demikian, perkara yang paling mengkhawatirkan adalah mengenai salah perhitungan yang menyebabkan *cost overrun* atau pembengkakan biaya konstruksi yang berpotensi menjadi *debt trap* (jebakan utang). Sangat penting untuk melihat pengalaman negara lain dalam bernegosiasi dengan China, sebagaimana keberhasilan Malaysia dan Zimbabwe bernegosiasi ulang dengan China untuk menurunkan utang mereka. Presiden terpilih perlu menyiapkan strategi negosiasi secara berkala agar tidak merugikan negara lebih besar lagi.

3.

Menyelesaikan dampak sosial dan lingkungan dari investasi China

Sektor sosial dan lingkungan adalah sektor yang paling terdampak akibat operasi perusahaan China di Indonesia, terutama di sektor industri ekstraktif mineral. Oleh karena itu, presiden terpilih harus mampu mendorong seluruh entitas tersebut untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dengan menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan.

Sangat vital bagi pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, lokal, CSOs, perusahaan, hingga masyarakat sipil. Presiden terpilih nantinya perlu mengupayakan perjanjian yang kuat dalam memastikan perusahaan China menerapkan standar tata kelola dan lingkungan yang baik. Komitmen tegas dari pemerintah juga diperlukan untuk mengusut tuntas kasus terkait, termasuk apabila terjadi penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

4.

Negosiasi mengenai Tenaga Kerja Asing China dan mendorong perlindungan pekerja lokal

Polemik mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) China terus menyita perhatian publik, terutama sejak masa pandemi hingga kini. Berdasarkan MoU di bawah kesepakatan proyek *Belt and Road Initiative*, TKA China yang datang ke Indonesia haruslah merupakan tenaga ahli karena 2 hal; pertama, untuk menekan jumlah pekerja China dan memprioritaskan pembukaan lapangan kerja bagi penduduk lokal dalam implementasi proyek *Belt and Road Initiative*; kedua, untuk memastikan adanya proses *knowledge transfer* sehingga pekerja Indonesia dapat mengadopsi dan meningkatkan keahlian teknis mereka.

Sangat disayangkan kenyataan di lapangan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Pasalnya, banyak pekerja dengan kompetensi keahlian rendah yang justru diisi oleh TKA China. Presiden terpilih harus segera melakukan renegotiasi kesepakatan dan secara bersama-sama memaksimalkan upaya pengawasan agar aturan yang ada benar-benar teraktualisasi di lapangan.

Dalam konteks renegotiasi berkaitan TKA China, Arab Saudi misalnya, berhasil menuntut China untuk merubah MoU dan memberikan porsi yang lebih besar untuk menyerap pekerja lokal dibandingkan pekerja asing dengan perbandingan 80:20. Tak hanya itu, pemerintah Arab Saudi juga mewajibkan perusahaan China bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memastikan adanya *transfer knowledge* dan kolaborasi yang mutual.

Selain itu, presiden yang terpilih nantinya juga perlu memberikan perhatian khusus untuk menjamin kesejahteraan pekerja lokal maupun pekerja asing yang dipekerjakan dalam proyek *Belt and Road Initiative*, salah satunya di perusahaan smelter nikel kawasan Morowali. Menurut laporan dari CELIOS dan diperkuat oleh laporan Project Multatuli, kondisi pekerja lokal dan pekerja China di kawasan Morowali sangat tertindas. Banyak dari mereka yang mengalami intimidasi, pemotongan gaji, pemberian denda, hingga dilarang mengkritik dan menyebarkan berita yang dapat merusak citra perusahaan dengan ancaman penjara. Kondisi yang tidak berpri kemanusiaan ini sangat memprihatinkan. Alhasil, hal tersebut menyebabkan banyak pekerja yang mengalami depresi hingga bunuh diri.

5.

Jangan biarkan ketergantungan terhadap China membutakan Indonesia terhadap isu HAM yang melibatkan China

Hubungan ekonomi yang erat antara Indonesia dan China seharusnya tidak membuat Indonesia memilih diam dan bersikap apatis menanggapi isu penindasan ataupun pelanggaran HAM yang melibatkan China.

Gelombang kekecewaan yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat Indonesia ketika pemerintah dengan sadar memilih menolak mosi pembahasan mengenai isu Xinjiang di Dewan HAM PBB pada 2022 yang lalu. Insiden ini dianggap sebagai sebuah kemunduran yang nyata atas kepedulian Indonesia terhadap isu keadilan HAM.

Presiden terpilih diharapkan dapat menjadi sosok teladan yang mampu bersikap tegas atas penegakan isu kemanusiaan. Alih-alih khawatir dengan adanya politisasi dalam Dewan HAM untuk tujuan terkait rivalitas geopolitik, Indonesia malah terlihat mengambil sikap hati-hati sebagai konsekuensi ketergantungannya terhadap China yang multisektor.

Begitu juga dengan tanggapan pemerintah Indonesia yang seolah pasif dalam mengusut tuntas isu penindasan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di Kapal berbendera China. Mereka diintimidasi, dieksploitasi, bahkan sejumlah ABK Indonesia dikabarkan meninggal dan hilang di negara lain. Adalah tugas negara untuk memberikan perlindungan dan membawa pulang warganya dengan selamat ke Tanah Air. Sayangnya, isu ini luput dalam interaksi diplomatik antara Indonesia dan China sehingga banyak kasus serupa yang tidak terselesaikan.

6.

Menyelesaikan isu Laut China Selatan dengan tegas dan konsisten

Presiden terpilih harus bersikap tegas dan konsisten menghadapi agresivitas China di Laut China Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, *China Coast Guard* dan kapal-kapal China secara ilegal sangat aktif berpatroli di sekitar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, hingga memasuki perairan Natuna Utara. Kendati demikian, Angkatan Laut Indonesia tidak banyak mengambil langkah antisipatif dan hanya memonitori dari jarak kurang dari satu mil.

Status hubungan lintas sektor, seperti ekonomi, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan yang terus menguat dengan China seharusnya tidak menjadikan alasan Indonesia untuk menggadaikan kewibawaannya dan tak mampu bersikap tegas terhadap ancaman kedaulatan negara.

7.

Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan lokal

Sangat esensial bagi presiden terpilih untuk segera memperkuat koordinasi yang berkesinambungan dari semua level pemerintah, baik pusat maupun daerah. Koordinasi yang sinergis akan dapat meminimalisir celah dan upaya kecurangan dari oknum yang tak bertanggung jawab.

Terutama bagi daerah yang memiliki Sumber Daya Alam mineral (*critical mineral*), kekayaan tersebut justru sangat berpotensi menjadi konflik kepentingan para pemangku kebijakan untuk melakukan korupsi. Di sisi lain, tak dapat dipungkiri, terdapat upaya-upaya China mendekati pemerintah lokal, daerah, dan provinsi secara langsung untuk mencari celah keuntungan.

Mitigasi risiko harus dapat mengantisipasi terjadinya insiden tersebut, salah satunya dengan memperkuat saluran koordinasi dan monitoring antara pusat dan daerah. Tak cukup sampai di situ, pemerintah Indonesia harus menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk membekali perangkat Pemda dengan pelatihan dan keahlian dalam berinteraksi, bekerja sama, dan bernegosiasi dengan China.

8.

Perlu konsistensi komitmen penerapan kebijakan hilirisasi

Implementasi kebijakan hilirisasi menuai kritik karena pemerintah dinilai melakukannya dengan setengah hati. Berbagai polemik muncul sebagai akibat dari kurang konsistennya pemerintah Indonesia dalam memitigasi aksi korupsi yang diakibatkan oleh aturan ini, terutama dalam menangani ekspor nikel ilegal.

Baru-baru ini diketahui sebanyak 5 juta ton nikel diekspor secara ilegal ke China, yang sudah dilakukan dalam kurun tahun 2021-2022. Artinya, kebijakan ini menjadi bermasalah tanpa adanya pengawasan yang ketat. Pemerintah harus lebih siaga merapatkan pengawasan dan memberantas mafia di balik korupsi dan ekspor ilegal minerba.

9.

Memperkuat dan mendukung pusat penelitian yang berfokus mempelajari China

Siapapun kandidat presiden yang akan terpilih pada Pemilu 2024 nantinya tidak akan menegasikan fakta bahwa China masih akan tetap memiliki ruang dan peran besar dalam sektor perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, sangat vital bagi presiden terpilih untuk tak hanya memahami betul bagaimana strategi China dalam beraktivitas, tetapi juga memiliki pengertian yang inklusif dan ekstensif terhadap skema-skema investasi yang China tawarkan agar kemitraan yang terjalin melahirkan manfaat mutual yang berimbang.

Untuk memastikan bahwa pengetahuan dan kompetensi tersebut dimiliki oleh para pembuat kebijakan, maka pemerintah Indonesia perlu memfasilitasi tumbuhnya riset untuk meneliti konteks China melalui kajian yang teruji, akuntabel, dan kredibel. Akomodasi dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana riset dan pendirian pusat studi yang berfokus mendalami strategi ekonomi, politik, dan budaya dalam bermitra dengan China.

10.

Perlu meminimalisir kepentingan personal politisi dalam berhubungan dengan China

Jangan sampai kepentingan China di Indonesia, khususnya proyek *Belt and Road Initiative*, hanya dimanfaatkan oleh segelintir kelompok untuk mengakomodir kepentingan oligarki.

Beberapa politisi telah banyak dikritik karena menjadi boneka China yang seolah telah menjual negaranya demi keuntungan ekonomi pribadi. Perlu disampaikan, bahwa tak ada yang salah dengan upaya pemerintah menjalin kemitraan dengan negara manapun, termasuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan China. Kendati demikian, jangan sampai upaya tersebut menodai amanat konstitusi dengan memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

- Adinda, Permata. 2023. "Kematian, Kecelakaan Kerja, Pemberangusan Serikat, Kriminalisasi: Nasib Pekerja Indonesia dan Tiongkok di Industri Smelter Nikel PT GNI." Project Multatuli, May 27, 2023. <https://projectmultatuli.org/kematian-kecelakaan-kerja-pemberangusan-serikat-kriminalisasi-nasib-pekerja-indonesia-dan-tiongkok-di-industri-smelter-nikel-pt-gni/>.
- Annur, Cindy M. 2023. "Investasi Tiongkok di Indonesia Melonjak 63% pada 2022." Databoks, January 11, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/11/investasi-tiongkok-di-indonesia-melonjak-63-pada-2022>.
- Berty, Teddy T. 2023. "Anies Baswedan Bertemu Eks PM Australia Malcolm Turnbull, Bahas Energi hingga Iklim Global." Liputan6.com, March 6, 2023. <https://www.liputan6.com/global/read/5225137/anies-baswedan-bertemu-eks-pm-australia-malcolm-turnbull-bahas-energi-hingga-iklim-global>.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2023. https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik.
- CELIOS. 2023. "Polemik Investasi China Di Indonesia: Bagaimana Menghindari Kualitas Investasi yang Rendah dan Jebakan Utang?". <https://celios.co.id/2023/policy-paper-polemik-china-menghindari-investasi-berkualitas-rendah-dan-jebakan-utang/>.
- Cindya, Aria. 2021. "China tegaskan komitmen perkuat kerjasama vaksin dengan Indonesia". Antara News, July 15, 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2268914/china-tegaskan-komitmen-perkuat-kerja-sama-vaksin-dengan-indonesia>.
- CNN Indonesia. 2022. "Bagaimana Hubungan Politikus-Parpol RI dan Partai Komunis China?" CNN Indonesia, October 15, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221013150802-106-860136/bagaimana-hubungan-politikus-parpol-ri-dan-partai-komunis-china>.
- CNN Indonesia. 2023. "Masa Jabatan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil Habis 5 September." CNN Indonesia, January 12, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230112181718-617-899688/masa-jabatan-ganjar-pranowo-dan-ridwan-kamil-habis-5-september>.
- Farasonalia, Riska. 2023. "Investasi 59 Perusahaan China di Jateng Tembus 2 Miliar Dolar AS." June 22, 2023. <https://amp.kompas.com/regional/read/2019/11/15/15063631/investasi-59-perusahaan-china-di-jateng-tembus-2-miliar-dolar-as>.
- Fauzi. 2023. "Ganjar Pranowo tegaskan siap lanjutkan kerja besar Jokowi." Antaranews.com, April 22, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3501648/ganjar-pranowo-tegaskan-siap-lanjutkan-kerja-besar-jokowi>.
- Fitriani, Erika D. 2023. "Tingkatkan Kerja Sama Jateng-China, Ganjar: Tenaga Kerja Minimal 10 Ribu." Detik.com, May 10, 2023. <https://www.detik.com/jateng/jawa-tengah-meriah/d-6713520/tingkatkan-kerja-sama-jateng-china-ganjar-tenaga-kerja-minimal-10-ribu>.
- Hadiyantono, Tane. 2018. "Perindo bakal raih satu lagi kontrak ekspor dari perusahaan China", Kontan.id, June 20, 2018. <https://nasional.kontan.co.id/news/perindo-bakal-raih-satu-lagi-kontrak-ekspor-dari-perusahaan-china>.
- Hakim, Ikhsan A. 2023. "Prabowo Bertemu Menhan China, Tingkatkan Kerja Sama Jakarta-Beijing." KOMPAS.tv, June 4, 2023. <https://www.kompas.tv/internasional/413032/prabowo-bertemu-menhan-china-tingkatkan-kerja-sama-jakarta-beijing>.
- Ihsanuddin. 2022. "Anies 8 Hari Dinas ke Eropa, Apa Saja Hasilnya? Halaman all - Kompas.com." <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/23/13532501/anies-8-hari-dinas-ke-eropa-apa-saja-hasilnya?page=all>.
- Ilmie, M. I. 2019. "Prabowo dan Menhan China bicarakan peningkatan kerja sama." Antaranews.com, December 16, 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/1211423/prabowo-dan-menhan-china-bicarakan-peningkatan-kerja-sama>.
- Indrayanto, Heru. 2022. "Ganjar's Support Jumps by 10 Points in 20 Months." Jakarta Globe, November 27, 2022. <https://jakartaglobe.id/news/ganjars-support-jumps-by-10-points-in-20-months>.

- Jaya, Pajar, H, I. 2017. "Distorsi Komunikasi Pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi di Media Sosial" *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 14, No. 2. (2017): 259-276.
- Junida, Ade I. 2019. "Bahliil sambut rencana 59 pabrik China relokasi ke Jawa Tengah." *Antaraneews.com*, November 5, 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/1148328/bahlil-sambut-rencana-59-pabrik-china-relokasi-ke-jawa-tengah>.
- Karina, Dina. 2022. "Anies Baswedan Tawarkan Investasi MRT Pada Delapan Perusahaan Inggris." *KOMPAS.tv*, May 16, 2022. <https://www.kompas.tv/bisnis/289036/anies-baswedan-tawarkan-investasi-mrt-pada-delapan-perusahaan-inggris>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2022. "Gerakan Non Blok Gnb | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." *Kemlu*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman_list_lainnya/gerakan-non-blok-gnb.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Menhan Prabowo Bertemu Menhan China Bicarakan Kerja Sama Komprehensif, June 4, 2023. <https://www.kemhan.go.id/2023/06/04/menhan-prabowo-bertemu-menhan-china-bicarakan-kerja-sama-komprehensif.html>.
- Kusnandar, Viva B. 2023. "Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Terkuat, Jauh di Atas Partai Lain." *Databoks*, January 6, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/06/survei-indikator-elektabilitas-pdip-terkuat-jauh-di-atas-partai-lain>.
- Lavinda. 2018. "Perusahaan Baja China Investasi US\$2,54 Miliar di Jateng." *CNN Indonesia*, July 25, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180725134236-92-316849/perusahaan-baja-china-investasi-us-254-miliar-di-jateng>.
- Lindsey, Timothy, and Helen Pausacker, eds. 2005. *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Liputan6. 2011. "PDIP pun Jalin Kerja Sama dengan PKC - News Liputan6.com." *Liputan6.com*, June 7, 2011. <https://www.liputan6.com/news/read/338037/pdip-pun-jalin-kerja-sama-dengan-pkc>.
- McBride, James et al. 2023. "China's Massive Belt and Road Initiative". Council on Foreign Relations, February 2, 2023. <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative>.
- Mustajab, Ali. 2015. Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa Di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 5 (1).
- Nababan, Christine N. 2019. "Prabowo Minta Indonesia Tiru China Tekan Kemiskinan." *CNN Indonesia*, April 13, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190413155620-532-386006/prabowo-minta-indonesia-tiru-china-tekan-kemiskinan>.
- Nuraini, Tantiya N. 2021. "Jika Prabowo Nyapres Lagi di 2024, Pertama di Sejarah RI 4 Kali Maju Pilpres." *Merdeka*, September 2, 2021. <https://www.merdeka.com/trending/jika-prabowo-nyapres-lagi-di-2024-pertama-di-sejarah-ri-4-kali-maju-pilpres.html>.
- Raditya, Iswara N. 2019. "Sejarah Keakraban PDIP & Partai Komunis Cina yang Bertemu Jokowi." *Tirto.ID*, September 24, 2019. <https://tirto.id/sejarah-keakraban-pdip-partai-komunis-cina-yang-bertemu-jokowi-eiBi>.
- Rakhmat, Muhammad Z. 2020. "Indonesia and China inked a deal to promote the use of the Yuan and Rupiah. The political and economic implications are huge". *The Conversation*, October 14, 2020. <https://theconversation.com/indonesia-and-china-inked-a-deal-to-promote-the-use-of-the-yuan-and-rupiah-the-political-and-economic-implications-are-huge-147493>.
- Rakhmat, Muhammad Z. 2021. *Neo-Gramscianisme dan Geliat Tiongkok di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor Press.
- Rakhmat, Muhammad Z. 2022. "Banyak Partai di Indonesia Ternyata Bekerja Sama Akrab dengan Partai Komunis Cina." *VICE*, April 12, 2022. <https://www.vice.com/id/article/7kb3z9/daftar-partai-di-indonesia-yang-menjalin-kerja-sama-akrab-dengan-partai-komunis-cina-mencakup-pdip-pks-golkar>.
- Rakhmat, Muhammad Z., and Yeta Purnama. 2023. "Why Indonesian Presidential Candidate Anies Baswedan is Likely Bad News for China." *Australian Institute of International Affairs*, June 8, 2023. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/why-indonesian-presidential-candidate-anies-baswedan-is-likely-bad-news-for-china/>.

- Saputra, Harian N. 2023. "Ganjar Ingin Indonesia Tiru Rusia, China dan India: Tinggalkan Barat?" *Kabar24*, June 16, 2023. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230616/15/1666254/ganjar-ingin-indonesia-tiru-rusia-china-dan-india-tinggalkan-barat>.
- Shafira, Ima D. 2023. "Koalisi Perubahan Resmi Dibentuk, Usung Anies Baswedan Capres 2024." *Nasional tempo*, March 24, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1706658/koalisi-perubahan-resmi-dibentuk-usung-anies-baswedan-capres-2024>.
- Storey, Ian James. 2000. "Indonesia's China Policy in the New Order and Beyond: Problems and Prospects." *Contemporary Southeast Asia* 22, no. 1: 145-74. <http://www.jstor.org/stable/25798482>.
- Sukma, Rizal. 2009. "Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement". *Asian Survey*. Vol. 49, No. 4: 591-608.
- Sukma, Rizal. 1999. *Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship*. London: Routledge.
- Suryadinata, Leo, ed. 2008. *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Suryadinata, Leo, and Candice Chan. 2022. "Ganjar Pranowo: Indonesia's potential presidential candidate stuck between a rock and a hard place." *ThinkChina*, October 7, 2022. <https://www.thinkchina.sg/ganjar-pranowo-indonesias-potential-presidential-candidate-stuck-between-rock-and-hard-place>.
- Suryasumirat, Ratu A. 2018. "Duta Besar China Bertemu Prabowo di Hambalang." *Liputan6.com*, September 26, 2018. <https://www.liputan6.com/news/read/3653244/duta-besar-china-bertemu-prabowo-di-hambalang>.
- Swasty, Renatha. 2022. "Diusung NasDem, Intip Latar Belakang Pendidikan Anies yang Langgan Dapat Beasiswa hingga Penghargaan." *Medcom.id*, October 3, 2022. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/nbwD0mDk-diusung-nasdem-intip-latar-belakang-pendidikan-anies-yang-langgan-dapat-beasiswa-hingga-penghargaan>.
- Toriq, Ahmad. 2022. "Prabowo dan Menhan China Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan." *detikNews*, November 19, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6414772/prabowo-dan-menhan-china-bahas-penguatan-kerja-sama-pertahanan>.
- Utami, Rini. 2015. "Hubungan Indonesia-Tiongkok: dari Soekarno hingga Jokowi." *Antaraneews.com*, April 13, 2015. <https://www.antaraneews.com/berita/490460/hubungan-indonesia-tiongkok-dari-soekarno-hingga-jokowi>.
- Wardhana, Thomas. 2022. "Momen Kedekatan Anies Baswedan & Dubes AS Saat Diskusi Disela Persiapan KTT G20." *Merdeka.com*, November 15, 2022. <https://www.merdeka.com/trending/momen-kedekatan-anies-baswedan-amp-dubes-as-saat-diskusi-disela-persiapan-ktg20-momen-kedekatan-anies-baswedan.html>.
- Wiryo, Singgih. 2023. "Bertemu CEO Bloomberg NEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta". *Kompas.com*, May 16 2023. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/16/06480521/bertemu-ceo-bloombergnef-di-london-anies-jajaki-kerja-sama-percepatan>.
- Zou, Yizheng. 2023. "China and Indonesia's responses to maritime disputes in the South China Sea: forming a tacit understanding on security". *Marine Policy*, Vol. 149.